

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- _____, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Agussalim, 2007, *Pemerintahan Daerah, Kajian Politik dan Hukum*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Aminuddin Ilmar, 2010, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana, Jakarta.
- Baihaki dan Arif Rachman, 2021, *Modul Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 “Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta.
- Budi Bowo Laksono dan Inamawati Mastuti Dewi, 2021, *Modul Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta.
- I Made Pasek Dianta, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta.
- I Nyoman Sumaryadi, 2016, *Reformasi Birokrasi Pemerintahan (Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa’at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta.
- Muhammad Jufri Dewa, 2011, *Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Unhalu Press, Kendari.

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenada Media Group, Jakarta.
- _____, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Philipus M Hadjon dkk, 2011, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjadara University Press, Yogyakarta.
- Ridwan H.R, 2016, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- S.F. Marbun, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi Edisi 1*, Raja Grafindo Persada, hlm. Jakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis Edisi 2*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2021, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*, UI Press, Jakarta.
- Tanto Lailam, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Prudent Media, Yogyakarta.
- Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yudhi Setiawan, 2017, *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik*, Rajawali Press, Depok.
- Yuslim, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344.

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara*, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897.
- Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890.
- Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6781.
- Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33.
- Presiden Republik Indonesia, *“Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”*, Lembaran Negara R.I Tahun 2021 Nomor 63.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia*, Berita Negara R.I Tahun 2021 Nomor 593.
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1620/KPTS/M/2021 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang Jasa.
- Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/IN/M/2015 tentang Proses Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/IN/M/2022 tentang Proses Penetapan Pemenang Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 12/KPTS/DK/2022 tentang Tim Penjamin Mutu.

C. Jurnal/Makalah/Tulisan/Lainnya

Ahmad Gelora Mahardika dan Rizky Saputra, “Kedudukan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Legacy* Volume 1 No 1, 2021.

Ahmad Rustan Syamsuddin, “Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa”, *Jambura Law Review* Volume 2 No 2, 2020.

Azwar Iskandar, “Peran Alokatif Pemerintah Melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Indonesia”, *Jurnal Fiskal Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Volume 20 No 2, 2016.

Dian Agung Wicaksono, Dedy Kurniawan, Bimo Fajar Hantoro, “Diskursus Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Perbuatan Pemerintah Dalam Pengadaan Barang/Jasa”, *Jurnal Rechtsvinding* Volume 9 Nomor 3, 2020.

Eman Suparman. “Aspek Hukum Perdata dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Rancangan Undang- undang Tentang Pengadaan Barang/Jasa”, disampaikan dalam *Seminar Pembahasan Teknis Mengenai Masukan untuk Naskah Akademis RUU Pengadaan dikaitkan dengan Hukum Perdata dan Tipikor*, Jakarta, 20 November 2014.

Fadly Andrianto, “Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia”, *Administrative Law and Governance Journal*, Vol 3 Issue 1, 2020.

Grace Sharon, “Teori Wewenang Dalam Perizinan”, *Jurnal Justiciabelen* Volume 3 Nomor 1, 2021.

Jimly Asshidique, “Islam dan Tradisi Negara Konstitusi”, disampaikan pada *Seminar Indonesia-Malaysia UIN Padang*, Padang, 2010.

M. Julyano, dan A. Y. Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal CREPIDO*, Vol. 1, No. 1, 2019.

Mailinda Eka Yuniza, Ni Nengah Dhea Riska Putri Nandita, Ni Putu Maetha Maharani, “Sumber Kewenangan Pemerintah: Permasalahan dan Prospek Pengaturannya dalam Ius Constituendum”, *Udayana Master Law Journal* Vol 12 No 4, 2023.

Roseno Napu Setiawan, Yohanes G. Tuba Helan, Saryono Yohanes, “Wewenang dan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara” *Jurnal Arena Hukum* Volume 12 No 3, 2019.

Supandi, “Problematika Penerapan Eksekusi Putusan Peradilan TUN terhadap Pejabat TUN Daerah”, disampaikan pada *Workshop Penerapan Eksekusi*

Putusan PTUN Dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jakarta, 2004.

Tatiek Sri Djamiati, “Maladministrasi dalam Konteks Kesalahan Pribadi dan Kesalahan Jabatan, Tanggung Jawab Pribadi dan Tanggung Jawab Jabatan”, Philipus M Hadjon et, al., 2010, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta.

D. Website

Simpul KPBU Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat “*Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha*” <http://simpulkpbu.pu.go.id/>, dikunjungi pada 1 November 2023 jam 13.17.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Versi VI. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Dikunjungi pada 11 Januari 2024 jam 18.22.

E. Hasil Wawancara/Permintaan Data

Emin Adhi Muhaemin, Surat Jawaban Atas Permintaan Penelitian kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, 8 Mei 2024.

